

**ANALISIS PENGARUH INVESTASI PUBLIK DAN INVESTASI SWASTA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1)
Di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH:

NOVIA ARISANDI

BP/NIM. 2007/84981

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2011

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISIS PENGARUH INVESTASI PUBLIK DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA BARAT

Nama : Novia Arisandi
BP/NIM : 2007/84981
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juni 2011

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Zul Azhar, M.Si
NIP.195908051985031006

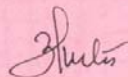
Pembimbing II



Novya Zulva Rianni, SE, M.Si
NIP.197111042005012001

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S
NIP. 19610502 198601 2 001

ABSTRAK

Novia Arisandi, 2007/ 84981 : Analisis Pengaruh Investasi Publik dan Investasi Swasta Terhadap Perekonomian Sumatera Barat. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di bawah bimbingan Bapak Drs.Zul Azhar, M.Si dan Ibu Novya Zulva Riani, SE, M.Si.

Investasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peningkatan dalam investasi baik publik maupun swasta merupakan salah satu prioritas yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Pengaruh investasi publik terhadap investasi swasta di Provinsi Sumatera Barat. (2) Pengaruh investasi publik dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dan asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan *time series* dari tahun 1985 sampai tahun 2009, yang dikumpulkan melalui dokumentasi dari instansi pemerintah yang terkait. Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis yaitu analisis deskriptif dan induktif yang terdiri atas analisis jalur (Path Analysis), uji t, uji F dan pengaruh langsung maupun tidak langsung dengan taraf signifikan 0,05.

Setelah data diolah dan dilakukan uji hipotesis dengan $\alpha = 0,05$ didapatkan hasil penelitiannya adalah (1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi publik terhadap investasi swasta di Provinsi Sumatera Barat. (2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi publik dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung investasi publik terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 36,71 persen. Jumlah pengaruh langsung investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 17,80 persen.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka disarankan (1) Agar Pemerintah Daerah Sumatera Barat membuat kebijakan anggaran yang sifatnya lebih mendorong pengeluaran yang sifatnya investasi daripada pengeluaran yang bersifat konsumtif. (2) Agar Pemerintah Daerah Sumatera Barat dapat mendorong peningkatan modal dari pihak swasta melalui kebijakan dan kemudahan birokrasi serta penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung investasi seperti infrastruktur, sarana dan prasarana.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kejahiliyahan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Didorong oleh semua itu jualah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pengaruh Investasi Publik dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat.”

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si selaku pembimbing I sekaligus penasehat akademis penulis yang telah meluangkan waktu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya terima kasih kepada Ibu Novya Zulva Riani, SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan-masukan demi kesempurnaan skripsi ini. Disamping itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak tim penguji skripsi, Bapak Drs. Alianis, M.S dan Bapak Doni Satria, SE, M.SE yang telah memberikan saran perbaikan demi kesempurnaan skripsi ini.

2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan petunjuk-petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang terus memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/ Ibu dosen dan staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
5. Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat beserta staf dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengambilan data.
6. Orang tua serta keluarga yang terus memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Pembangunan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang telah membantu, semoga Allah Yang Maha Agung memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua.

Padang, Juni 2011
Penulis

Novia Arisandi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan Skripsi	
Halaman Pengesahan Lulus Ujian Skripsi	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Teori	13
1. Teori Pertumbuhan Ekonomi	13
2. Konsep Investasi	16
3. Konsep Investasi Publik	20
4. Pengaruh Investasi Publik Terhadap Investasi Swasta	26
5. Penelitian Sejenis	31
B. Kerangka Konseptual	32
C. Hipotesis	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian	35
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Variabel Penelitian	36

E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Defenisi Operasional	37
G. Teknik Analisis Data	38

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian	46
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	46
2. Analisis Deskriptif Variabel	49
a. Deskriptif Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat	49
b. Deskriptif Investasi Publik Sumatera Barat	53
c. Deskriptif Investasi Swasta Sumatera Barat	57
3. Analisis Induktif	62
a. Uji Normalitas Sebaran Data	62
b. Analisis Jalur	62
1) Pengaruh Variabel Penyebab Terhadap Variabel Antara(Intervening Variabel)	63
2) Pengaruh Variabel Penyebab dan Variabel Perantara Terhadap Variabel Akibat	65
3) Besaran Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Antara Variabel Penyebab Terhadap Variabel Akibat	70
c. Pengujian Hipotesis	71
B. Pembahasan	73

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Indonesia (2000-2009)	5
2. Perkembangan Investasi Publik dan Investasi Swasta di Sumatera Barat (2000-2009)	7
3. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat (1994-2009)	49
4. Perkembangan PDRB ADHK (2000) dan Laju PE Provinsi Sumatera Barat (1985-2009)	52
5. Perkembangan Investasi Publik di Sumatera Barat (1985-2009)	56
6. Perkembangan Investasi Swasta di Sumatera Barat (1985-2009)	60
7. Uji Normalitas Sebaran Data	63
8. Analisis Varians atas Investasi Publik terhadap Investasi Swasta	64
9. Nilai Penduga Koefisien Jalur	66
10. Analisis Varians atas Investasi Publik dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	67
11. Nilai Penduga Koefisien Jalur	68
12. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Variable Penyebab terhadap Variabel Akibat	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	34
2. Struktur Hubungan Pengaruh Variabel Penyebab Terhadap Variabel Perantara.....	45
3. Strukrur Pengaruh Variabel Penyebab, Variabel Perantara Terhadap Variabel Akibat	46
4. Struktur Pengaruh Variabel Penyebab Terhadap Variabel Antara	66
5. Struktur Pengaruh Variabel Penyebab Terhadap Variabel Akibat	69
6. Struktur Pengaruh Variabel Penyebab Terhadap Variabel Akibat Melalui Variabel Antara	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Tabulasi Data dan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Publik dan Investasi Swasta di Provinsi Sumatera Barat (1985-2009)	84
2. Olahan Data Skripsi	85
3. Daftar tabel uji t	91
4. Daftar tabel uji F	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah dengan tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Disini proses mendapat penekanan karena mengandung unsur yang dinamis. Para teoritikus ilmu ekonomi pembangunan pada masa kini masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoritikus menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, akan tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh masyarakat luas. (Arsyad, 2004).

Dalam kegiatan perekonomian, pertumbuhan ekonomi berarti adanya perkembangan fisik produksi barang dan jasa, seperti pertambahan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi barang modal.

Pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah diharapkan memperlihatkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.

Guna memacu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka dibutuhkanlah dana atau investasi sebagai sumber modal dalam perekonomian. Akumulasi modal meliputi semua jenis investasi baik yang dilakukan oleh pemerintah (sektor publik) maupun swasta, yang ditanamkan dalam bentuk peralatan fisik dan peningkatan kualitas modal manusia.

Pakar ekonomi seperti Rostow dan Harrod-Domar adalah beberapa dari pakar ekonomi yang memperkenalkan model pertumbuhan yang memperhitungkan pentingnya investasi dalam menunjang pembangunan ekonomi. Menurut Rostow, salah satu dari sekian banyak strategi pokok pembangunan untuk tinggal landas adalah penggerakan atau mobilisasi dana tabungan, baik dalam mata uang domestik maupun valuta asing guna menciptakan bekal investasi yang memadai untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2003).

Peranan investasi publik, yang merupakan salah satu bagian dari akumulasi modal, terhadap pertumbuhan ekonomi semakin mendapat perhatian seiring dengan meningkatnya isu liberalisasi perdagangan dan

privatisasi perekonomian, dimana perekonomian ditandai dengan menurunnya peran pemerintah dan meningkatnya peran swasta dalam alokasi dan distribusi sumber daya. Selain efisiensinya yang rendah, aspek lain terhadap keberatan investasi publik adalah fenomena yang oleh para ekonom disebut “crowding out” atau proses pengurangan yaitu konsep pemikiran yang menyatakan bahwa peningkatan belanja pemerintah, defisit anggaran, dan hutang pemerintah dapat mengurangi investasi dunia usaha (Samuelson dan Nordhaus, 2004).

Investasi publik meskipun pada awalnya tidak efisien, namun dalam jangka panjang akan sangat efisien seperti peningkatan produktivitas melalui pendidikan dan kesehatan. Investasi pemerintah juga dapat mengurangi ketidakmerataan penyebaran penduduk, karena penduduk akan bersedia pindah ke daerah baru yang sudah tersedia infrastrukturnya (Sukirno, 2000). Infrastruktur merupakan barang komplementer yang sangat berpengaruh bagi investasi swasta karena dapat menurunkan biaya angkut dan meningkatkan volume perdagangan serta merupakan faktor penentu pertumbuhan jangka panjang yang dominan (Jhingan, 2004).

Sedangkan peran investasi swasta juga sangatlah penting, guna mendukung keterbatasan investasi pemerintah. Investasi yang dilakukan oleh sektor swasta ini lebih menitikberatkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan output guna memperoleh keuntungan. Investasi swasta ini diharapkan mampu merangsang kegiatan ekonomi dikalangan masyarakat sehingga diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian.

Era otonomi daerah pada masa sekarang ini telah menghadirkan suatu kondisi dimana setiap daerah dituntut untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi peran dari pemerintah daerah sangatlah penting dalam mengatur berbagai kebijakan yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki daerahnya guna tercapainya tujuan perekonomian daerah tersebut.

Pentingnya peran pemerintah dalam suatu sistem perekonomian telah banyak dibahas dalam teori ekonomi publik. Selama ini banyak diperdebatkan mengenai seberapa jauh peranan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan setiap orang berbeda dalam penilaian mengenai biaya keuntunagan yang diperoleh dari program yang dibuat oleh pemerintah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat selami ini sangat bergantung kepada jasa yang disediakan oleh pemerintah. Banyak pihak yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas dan pengeluaran pemerintah. Beberapa hasil penelitian menunjukkan peranan yang positif dari modal publik terhadap pertumbuhan ekonomi (Aschauer dalam Erden, 2005).

Peran pemerintah daerah dapat dijalankan melalui salah satu instrumen kebijakan, yaitu pengeluaran pemerintah (baik belanja rutin maupun belanja pembangunan). Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah dengan tujuan investasi.

Sumatera Barat sebagai salah satu daerah yang berada dalam tahap pembangunan ekonomi membutuhkan aliran investasi baik yang berasal dari

sektor swasta guna mempercepat perkembangan perekonomian daerah, dan dari sektor publik (pemerintah) yang selain untuk memperlancar akses ekonomi di daerah melalui penyediaan infrastruktur, juga berdampak pada perkembangan modal manusia Sumbar sendiri. Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintah daerah biasanya diindikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Perkembangan perekonomian Sumatera Barat yang tergambar dari perolehan PDRB serta laju pertumbuhannya selama kurun beberapa tahun mengalami fluktuasi, kondisi ini juga diikuti oleh fluktuasi nilai investasi di Sumatera Barat baik yang bersumber dari pemerintah (sektor publik) maupun dari pihak swasta. Seperti terlihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto, Investasi Publik dan Investasi Swasta Sumatera Barat tahun 2000-2009

Tahun	PDRB (ADHK 2000)	LP (%)	Investasi Publik (dalam jutaan rupiah)	LP (%)	Investasi Swasta (dalam jutaan Rp)	LP (%)
2000	22.889.614,05	-	117.063,58	-	249.098,92	-
2001	23.727.373,93	3,66	131.111,31	12,00	291.566,89	17,05
2002	24.840.187,76	4,69	130.477,48	-0,48	466.749,84	60,08
2003	26.146.781,63	5,26	149.636,36	14,68	233.804,78	-49,91
2004	27.574.359,92	5,47	105.819,35	-29,28	661.265,97	182,83
2005	29.159.480,53	5,73	126.476,21	19,52	692.630,28	4,47
2006	30.949.945,10	6,14	210.722,57	66,61	322.280,52	-53,47
2007	32.912.968,59	6,34	273.733,25	29,90	65.539,86	-79,66
2008	35.007.921,57	6,37	383.078,05	39,95	629.544,21	860,55
2009	36.464.005,12	4,16	462.031,80	20,61	782.611,96	24,31
Rata-rata	28.967.267,42	5,31	209.015,00	17,35	439.513,82	96,62

Sumber: BPS Sumbar. Sumatera Barat Dalam Angka (2000-2010)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,66%. Dan pada tahun 2002 kondisi perekonomian Sumbar kembali menunjukkan perbaikan terlihat dengan peningkatan angka pertumbuhan dari tahun sebelumnya ke angka 4,69%. Hal ini mungkin dikarenakan adanya peningkatan investasi baik dari sektor publik maupun swasta. Pada tahun 2003 angka pertumbuhan ekonomi Sumbar kembali meningkat menjadi 5,26 %. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Sumbar merupakan pertumbuhan tertinggi diantara tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,37%. Walaupun angka ini hanya meningkat tipis dari tahun sebelumnya tahun 2007, angka yang dicapai pada tahun tersebut yakni sebesar 6,34%. Pada tahun 2009 perekonomian Sumbar sedikit mengalami kemunduran dengan laju pertumbuhan hanya sebesar 4,16%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selama kurun waktu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 adalah sebesar 5,31%, sedangkan untuk rata-rata PDRBnya selama kurun waktu yang sama adalah sebesar Rp 28.967.267,42. Angka ini masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional, karena pencapaian rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional adalah sebesar 6,4%.

Fluktuasi ekonomi Sumatera Barat menunjukkan bahwa Sumbar masih membutuhkan banyak aliran dana investasi guna mencapai tingkat perekonomian yang mantap dan berkesinambungan, sehingga target pertumbuhan ekonomi yang terangkum dalam RPJMD dan RPJP, dimana pada tahun 2015 Sumatera Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar

7,46% dengan target investasi sebesar Rp 16,9 triliun, dan untuk target jangka panjangnya pemerintah Sumatera Barat menetapkan target pertumbuhan ekonomi Sumbar mencapai 8,1% pada tahun 2025 dapat tercapai. (<http://www.padangekspres.co.id>).

Salah satu upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan di daerah Sumatera Barat yaitu melalui peningkatan modal baik yang bersifat fisik maupun peningkatan modal manusia guna meningkatkan produktivitas. Aliran investasi di daerah Sumatera Barat selama kurun waktu beberapa tahun belakangan ini juga mengalami fluktuasi, baik investasi sektor publik melalui anggaran pembangunan pemerintah daerah Sumatera Barat maupun swasta.

Dari tabel.1 di atas dapat dilihat perkembangan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat turut mengalami fluktuasi. Pertumbuhan investasi pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 66,61% selama kurun waktu 2000 hingga 2009. Peningkatan ini juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Pada tahun 2001 pertumbuhan investasi publik di Sumatera Barat adalah sebesar 12 % Namun sedikit mengecewakan di tahun berikutnya dimana pertumbuhan investasi sektor publik menurun sebesar -0,48% . Namun pada tahun berikutnya yakni tahun 2003, pertumbuhan investasi publik kembali menunjukkan angka yang positif sebesar 14,68%, hal ini turut mendukung pertumbuhan ekonomi Sumbar pada tahun yang sama. Pada tahun 2004 pertumbuhan investasi publik tidak sebaik tahun sebelumnya, dimana pada tahun tersebut

pertumbuhan investasi publik menunjukkan pertumbuhan yang negatif sebesar -29,28%, hal ini mungkin dikarenakan keterbatasan sumber dana untuk investasi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Pada tahun 2005 angka pertumbuhan anggaran pembangunan pemerintah tumbuh positif sebesar 19,52%, begitupun untuk tahun berikutnya angka ini terus mengalami pertumbuhan yang positif yaitu 66,61% pada tahun 2006, 29,90% pada tahun 2007, 39,95% pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 angka pertumbuhan investasi sektor publik sebesar 20,61%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah menyadari bahwa perekonomian daerah harus turut didorong melalui pengeluaran yang bersifat investasi untuk pembangunan baik yang sifatnya fisik (berupa infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, sarana publik dll) maupun yang bersifat non fisik (berupa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan keamanan) sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Barat.

Besarnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain didorong oleh peran serta investasi publik daerah tersebut, juga sangat membutuhkan investasi dari pihak swasta baik domestik maupun asing guna memaksimalkan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah dalam mendorong perekonomian daerah. Keterlibatan pihak swasta tersebut dapat melalui penanam modal seperti yang terlihat pada tabel.1. Dari tabel.1 dapat dilihat bahwa penanaman modal swasta di daerah Sumatera Barat juga mengalami fluktuasi baik dalam jumlah dan pertumbuhannya. Hal ini kemungkinan dikarenakan oleh kondisi perekonomian dunia dan Indonesia khususnya yang mengalami goncangan

dalam kurun beberapa tahun belakangan. Pada tahun 2001 investasi swasta di Sumatera Barat mengalami pertumbuhan sebesar 17,05% dan meningkat pada tahun berikutnya sebesar 60,08%. Keadaan di tahun berikutnya yakni tahun 2003 tidak terlalu menggembirakan karena turunnya besaran investasi swasta sebesar -49,91%, tetapi kembali meningkat pada dua tahun berikutnya sebesar 182,83% pada tahun 2004 dan meningkat tipis sebesar 4,74% pada tahun 2005. Hal ini salah satunya mungkin dikarenakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sudah produktif sehingga menstimulasi pihak swasta untuk berinvestasi. Peningkatan di tahun sebelumnya ternyata tidak diikuti oleh tahun berikutnya dimana pada tahun 2006 dan 2007 aliran investasi swasta yang masuk ke Sumbar mengalami penurunan hingga -53,47% dan -79,66%, hal ini mungkin dikarenakan oleh ketidakstabilan perekonomian dunia kala itu, namun efeknya tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Tetapi kondisi yang menggembirakan kembali terjadi di tahun berikutnya dimana pada tahun 2008 dan 2009 angka pertumbuhan investasi swasta mengalami pertumbuhan yang positif yakni sebesar 860,55% pada tahun 2008 dan merupakan pertumbuhan investasi swasta tertinggi selama kurun waktu 2000 hingga 2009, serta 24,31% pada tahun 2009, hal ini mengindikasikan kepercayaan pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumbar.

Rata-rata pertumbuhan investasi dari sektor publik dan sektor swasta di Sumatera Barat selama kurun waktu tahun 2000 hingga 2009 memperlihatkan

angka yang menjanjikan yakni sebesar 17,35% untuk investasi publik dan 96,62% untuk investasi swasta. Oleh sebab itu pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola anggaran pengeluarannya, sehingga pengeluaran yang bersifat investasi mendapat proporsi yang sedikit lebih besar dibandingkan pengeluaran yang bersifat konsumtif. Hal ini selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumbar, juga diharapkan mampu menstimulasi aliran modal yang semakin besar dari pihak swasta.

Agar tercapainya suatu kondisi perekonomian daerah Sumatera Barat terutama pertumbuhan ekonominya yang baik, maka diperlukan peran serta dari sektor publik dan swasta yang saling bekerja sama. Investasi publik yang tercermin dari belanja pembangunan pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menunjang kesejahteraan masyarakat daerah tersebut dengan penyediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan dll. Hal ini juga berguna untuk menciptakan iklim berinvestasi di daerah yang kondusif dan aman, mengingat pentingnya investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ketersediaan infrastruktur ini akan berdampak baik bagi perekonomian daerah, karena kelancaran aksesibilitas serta pendidikan dan kesehatan berdampak pada peningkatan mutu sumber daya manusia Sumatera Barat, yang nantinya akan memberikan nilai plus bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian di atas yang memperlihatkan pentingnya investasi sektor publik dan investasi swasta yang saling menunjang dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Barat, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai peranan investasi publik dan investasi swasta serta pengaruhnya terhadap perekonomian Sumatera Barat dengan judul ***“Analisis Pengaruh Investasi Publik dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat.”***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah adalah:

1. Sejauhmana pengaruh investasi publik terhadap investasi swasta Provinsi Sumatera Barat ?
2. Sejauhmana pengaruh investasi publik dan investasi swasta secara langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh investasi publik terhadap investasi swasta Provinsi Sumatera Barat.
2. Pengaruh investasi publik dan investasi swasta secara langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat:

1. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan sektor publik terutama yang menyangkut investasi pemerintah daerah serta investasi swasta dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bagi pengembangan ilmu ekonomi seperti ekonomi regional, ekonomi publik, ekonomi makro dan ekonomi pembangunan serta perencanaan pembangunan.
3. Bagi pengambil kebijakan, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil dan menentukan kebijakan terutama yang menyangkut masalah peningkatan kinerja perekonomian daerah dan mendorong peningkatan output daerah seperti Bappeda Sumatera Barat, Pemda Sumatera Barat, BKPM dan dinas-dinas terkait lainnya.
4. Bagi penelitian lebih lanjut, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai literature / acuan yang mengkaji masalah sejenis.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

A. KAJIAN TEORI

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2004:423) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi berarti adanya perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dan diukur dari perkembangan output daerah (PDRB) atas harga konstan dari tahun ke tahun.

Kuznet (dalam Todaro, 2003:57) mendefenisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan.

Menurut Arsyad (2004:11) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Todaro (2003:92) mengemukakan bahwa ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama, akumulasi modal yang meliputi semua bentuk dan jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya akan membawa pertumbuhan angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi.

Beberapa teori pertumbuhan ekonomi antara lain:

a. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan kaum klasik bahwa sistem mekanisme pasar akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih efisien dan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Oleh sebab itu campur tangan pemerintah diharapkan seminimal mungkin. Fungsi pemerintah perlu dibatasi kepada penyediaan infrastruktur, mengembangkan pendidikan, dan menyediakan pemerintah yang efisien adalah beberapa langkah yang akan membantu perkembangan pihak swasta (Sukirno, 2004:433).

b. Teori Harrod-Domar

Teori ini pada dasarnya melengkapi analisis Keynes, mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Teori Harrod-Domar mengingatkan kita bahwa sebagai akibat investasi yang dilakukan tersebut pada masa berikutnya kapasitas barang-barang modal dalam perekonomian akan bertambah. Dalam perekonomian dua sektor, penambahan perbelanjaan agregat harus terwujud dari kenaikan investasi. Berarti untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang

teguh, investasi harus terus menerus mengalami peningkatan (Sukirno, 2004:435).

c. Teori Schumpeter

Teori pertumbuhan Schumpeter menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus menerus tetapi adakalanya mengalami kemunduran. Hal tersebut disebabkan oleh kegiatan para pengusaha yang melakukan inovasi dan pembaruan dalam menghasilkan barang dan jasa. Untuk mewujudkan inovasi, investasi dilakukan dan penambahan investasi ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Proses multiplier yang ditimbulkannya akan menyebabkan peningkatan lebih lanjut dalam kegiatan ekonomi dan perekonomian mengalami pertumbuhan yang lebih pesat (Sukirno 2004:434).

d. Model pertumbuhan Solow

Model pertumbuhan ini menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa. Model pertumbuhan Solow biasa disebut model pertumbuhan neoklasik. Model dasar Solow adalah:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L)$$

dimana ΔY merupakan pertumbuhan ekonomi, ΔK merupakan penambahan modal dan ΔL merupakan peningkatan angkatan kerja (Sukirno 2004:435).

Berdasarkan teori-teori pertumbuhan diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh perkembangan investasi. Bila investasi meningkat, output meningkat maka pendapatanpun akan meningkat. Oleh sebab itu pemerintah harus memberikan perhatian terhadap investasi melalui instrumen kebijakannya salah satunya kebijakan fiskal mengenai pengeluaran pemerintah dan kebijakan yang mendukung arus modal dari pihak swasta.

2. Konsep Investasi

Menurut Sukirno (2002:39) investasi adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Investasi ini memiliki 3 (tiga) peran:

- a) Merupakan salah satu komponen pengeluaran agregat, dimana peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional.
- b) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi di masa depan dan perkembangan ini menstimulir pertambahan produksi nasional dan kesempatan kerja.
- c) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi, sehingga akan memberikan kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat.

Menurut Samuelson (2004:136) dalam istilah makro ekonomi, investasi diartikan sebagai peningkatan barang modal berwujud dalam masyarakat baik peralatan, gedung atau persediaan. Investasi hanya terjadi apabila ada tambahan barang modal.

Menurut Sukirno (2002:109-115) faktor-faktor yang mempengaruhi investasi adalah:

- a. Tingkat keuntungan yang akan diperoleh.

Ramalan mengenai keuntungan dapat memberikan gambaran kepada para pengusaha mengenai jenis-jenis investasi yang mempunyai prospek yang baik untuk dilaksanakan dan besarnya investasi yang harus dilakukan untuk mewujudkan tambahan barang-barang modal yang diperlukan.

- b. Suku bunga

Suku bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pengusaha dan dapat dilaksanakan. Pengusaha hanya akan menanamkan modalnya apabila tingkat pengembalian modal dari investasi yang dilakukan yaitu persentase keuntungan yang akan diperoleh sebelum dikurangi bunga yang dibayar, lebih besar dari bunga.

- c. Ramalan mengenai keadaan ekonomi masa depan.

Dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan apakah akan memperoleh keuntungan atau menimbulkan kerugian, para pengusaha harus membuat ramalan-ramalan mengenai keadaan masa depan.

- d. Kemajuan teknologi.

Pada umumnya makin banyak perkembangan teknologi yang dibuat, makin banyak pula kegiatan pembaharuan yang dilakukan oleh para pengusaha. Untuk melaksanakan pembaharuan tersebut para pengusaha harus membeli barang-barang modal yang baru dan adakalanya juga harus mendirikan bangunan-bangunan pabrik, maka makin banyak pembaharuan yang dilakukan, makin tinggi tingkat investasi yang akan dicapai.

e. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya.

Tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat, dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi. Dengan kata lain dalam jangka panjang apabila pendapatan nasional bertambah tinggi maka investasi akan bertambah tinggi pula.

f. Keuntungan perusahaan.

Dana investasi diperoleh perusahaan dari meminjam atau tabungannya sendiri. Tabungan perusahaan terutama diperoleh dari keuntungan, semakin besar untungnya semakin besar pula keuntungan yang tetap dari simpanan perusahaan. Keuntungan yang semakin besar ini memungkinkan perusahaan memperluas usahanya atau mengembangkan usaha baru. Langkah seperti ini akan menambah investasi dalam perekonomian.

Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik mengartikan investasi sebagai suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi dengan

harapan untuk memperoleh keuntungan (benefit) pada masa-masa yang akan datang.

Penanaman modal di suatu daerah sangatlah penting karena proses pembangunan ekonomi memerlukan sumber modal, namun persediaan modal di daerah sangat terbatas, oleh karena itu diperlukan suntikan modal dari luar daerah. Untuk menunjang pembangunan ekonomi di suatu wilayah maka sangat diperlukan adanya sumber permodalan yang cukup besar untuk mendorong pergerakan usaha ekonomi masyarakat. Permodalan atau investasi ini dapat dihimpun dari daerah itu sendiri yaitu melalui investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta. Dengan adanya peningkatan investasi di suatu wilayah maka akan meningkatkan pendapatan wilayah itu sendiri.

Menurut BPS (2003) dilihat dari institusi yang melakukan, investasi dapat dibedakan atas:

a) Investasi Pemerintah (Public Investment)

Investasi Pemerintah dilakukan tidak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti jalan raya, irigasi, pelabuhan dan sebagainya. Investasi ini disebut juga Social Overhead Capital (SOC). Keuntungan investasi publik ini adalah bertambahnya permintaan efektif dan menaikkan pendapatan masyarakat. Public investment disebut juga sebagai investasi yang otonom, yaitu investasi yang timbul bukan karena adanya tambahan pendapatan.

Public investment bersifat otonom karena:

- 1) Pada umumnya biayanya tidak kecil, sehingga pihak swasta tidak mampu memikulnya.
- 2) Mempunyai produktivitas dan keuntungan yang tidak langsung, irigasi misalnya tidak memberikan keuntungan langsung, tetapi rehabilitasi dengan penyempurnaan irigasi itu merupakan prasarana yang penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Investasi yang dilakukan oleh pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak serta untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian daerah tersebut. Pemerintah biasanya melakukan investasi pada barang publik yang diharapkan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat banyak sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat dan daerah nantinya.

b) Investasi Swasta (Private Investment)

Investasi swasta merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak swasta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (laba). Investasi swasta secara murni meliputi pembelian, penambahan dan pembentukan barang modal dan penambahan stock. Pengeluaran investasi oleh swasta mencakup:

- 1) Pengeluaran untuk membeli bahan baku atau material, mesin dan peralatan pabrik, serta semua modal lain yang diperlukan untuk proses produksi.
- 2) Pengeluaran untuk keperluan bangunan, kantor, pabrik, tempat tinggal karyawan dan bangunan konstruksi.
- 3) Perubahan nilai stock/barang cadangan sebagai akibat perubahan jumlah harga.

3. Konsep Investasi Publik (Belanja Pembangunan/Modal)

Investasi publik yang dilakukan pemerintah melalui belanja pembangunan/ belanja modalnya memerlukan kebijakan dari pemerintah itu

sendiri. Pemerintah mengatur sedemikian rupa kebijakan anggaran pengeluaran (rutin dan pembangunan) agar menunjang laju perekonomian.

Menurut Mangkoesoebroto (1993:169) perkembangan pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, antara lain:

a. Teori Makro

1) Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah.

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana seperti transportasi, pendidikan kesehatan dan lain sebagainya. Pada tahap menengah peran investasi dari pemerintah masih diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun peran investasi swasta sudah semakin besar. Pada tahap lanjut, peran pemerintah masih sangat besar karena untuk menyeimbangkan peran swasta yang semakin besar dan untuk menyediakan barang-barang publik yang tidak mampu disediakan oleh swasta.

Musgrave (dalam Mangkoesoebroto 1993:170) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil.

Selanjutnya Rostow (dalam Mangkoesoebroto 1993:170) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana beralih ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial, seperti halnya program kesehatan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan lain sebagainya.

2) *Hukum Wagner*

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, US dan Jepang.

Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk hukum, akan tetapi dalam pandangannya tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah dalam pengertian pertumbuhan secara absolut atau relatif. Apabila yang dimaksud oleh Wagner adalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara relative sebagaimana teori Musgrave, maka hukum Wagner sebagai berikut:

Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

3) *Teori Peacock dan Wiseman*

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar

pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Peacock dan Wiseman ini juga didasarkan pada masih adanya toleransi dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran pemerintah melalui pungutan pajak, oleh karena toleransi ini, maka pemerintah tidak bisa secara semena-mena menaikkan tarif pungutan pajak.

Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut:

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP, menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah pusat harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat, dan pemerintah meningkatkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi berkurang.

Kesimpulan yang dapat diambil dari teori Peacock dan Wiseman adalah dengan adanya peningkatan dan perkembangan GNP di suatu wilayah akan menyebabkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah juga ikut membesar.

b. Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Seorang individu, mempunyai permintaan akan

barang-barang publik dan barang-barang swasta, akan tetapi permintaan efektif akan barang-barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (budget constrain).

Di Indonesia pengeluaran pemerintah terbagi dua, yaitu *pengeluaran rutin* dan *pengeluaran pembangunan*. Pengeluaran rutin berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, berbagai macam subsidi dan angsuran hutang serta pengeluaran lainnya. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik yang terdiri dari pembiayaan untuk proyek.

Suparmoko (2000:44) mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi:

- a) Pengeluaran investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang.
- b) Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat seperti bidang rekreasi.
- c) Pengeluaran yang merupakan penghematan untuk masa yang akan datang, misal pengeluaran untuk anak yatim.
- d) Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran tenaga kerja yang lebih luas.

Ilyas (1989:73) menyatakan bahwa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk biaya operasional penyelenggaraan roda pemerintahan, sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.

- b) Pengeluaran pembangunan merupakan kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi.

Selanjutnya dalam buku Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (2000:63) disebutkan bahwa anggaran belanja pembangunan memberikan gambaran mengenai peranan sektor pemerintah dalam pembangunan investasi nasional, yang sekaligus mencerminkan strategi kebijakan fiskal dalam:

- a) Mempengaruhi alokasi sumber daya ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan berusaha dan berbagai program pembangunan lainnya.
- b) Memperbaiki pemerataan distribusi pendapatan.
- c) Menunjang program stabilisasi, termasuk program penyelamatan (rescue) dan pemulihan (recovery) kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Selanjutnya menurut Abimayu (2005:14) belanja modal/pembangunan bukan saja digunakan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah melainkan juga mendorong perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Secara ringkas pengeluaran pembangunan (belanja modal) ini mencakup pengeluaran untuk:

- a) Sarana dan prasarana ekonomi, seperti untuk jalan raya, pelabuhan, kapasitas proyek, listrik, energi dll.
- b) Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan peran wanita
- c) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan perumahan dan pengembangan keagamaan.
- d) Peningkatan kapasitas pemerintah, anggaran pengembangan aparatur pemerintah.

Musgrave and Musgrave (1993:590) kembali mengemukakan tentang pentingnya investasi pemerintah, ia mengemukakan bahwa investasi

pemerintah dan pinjaman yang diberikan pemerintah memainkan peran strategis dalam pembangunan. Konsep pengadaan modal oleh pemerintah harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga meliputi juga investasi dalam sumber daya manusia yang akan meningkatkan produktivitas.

Jadi investasi publik merupakan bagian dari kebijakan pengeluaran pemerintah, dimana anggaran belanja yang dimiliki oleh pemerintah di belanjakan untuk keperluan pembangunan (investasi) terhadap kepentingan masyarakat banyak (publik). Investasi pemerintah ini berfungsi untuk mendorong dan mendukung perkembangan dunia usaha selain itu juga untuk stabilisasi kegiatan ekonomi.

Investasi publik diharapkan mampu menjadi stimulus bagi peningkatan daya beli masyarakat, melalui proyek-proyek produktif yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga diharapkan melalui investasi publik ini dapat menciptakan iklim berinvestasi yang aman dan kondusif sehingga mendorong pemasukan sumber investasi lainnya dari pihak swasta.

4. Pengaruh Investasi Publik Terhadap Investasi Swasta

Pengeluaran pemerintah terutama investasi dengan jumlah dana yang dibutuhkan relative besar, memiliki pengaruh terhadap investasi swasta dikarenakan efek dari peningkatan pengeluaran pemerintah ini akan berpengaruh terhadap tingkat suku bunga yang nantinya berdampak terhadap tingkat investasi.

Samuelson dan Nordhaus (2004:209) mengemukakan bahwa investasi publik selain memiliki efisiensi yang rendah juga memberikan efek *crowding out* atau proses pengurangan yang menyatakan bahwa peningkatan belanja pemerintah, defisit anggaran dan hutang pemerintah dapat mengurangi dunia usaha.

Selanjutnya Mankiw (2002:277) ketika terjadi peningkatan belanja pemerintah maka akan meningkatkan pendapatan sehingga akan mendorong permintaan uang, meningkatnya permintaan akan uang yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah uang beredar, maka hal inilah yang memicu kenaikan tingkat suku bunga yang menurunkan investasi.

Namun disisi lain investasi yang dilaksanakan pemerintah selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, juga ditujukan untuk mendorong penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi minat investor swasta untuk berinvestasi.

Musgrave and Musgrave (1993:516) mengemukakan bahwa investasi pemerintah sangatlah penting. Jika dilihat secara lebih luas lagi, jelaslah bahwa pembangunan oleh pemerintah berupa investasi fisik dan nonfisik mempunyai efek lanjutan yang mempengaruhi investasi swasta. Mobil akan mubazir jika jalan raya tidak tersedia dan teknologi modern hanya bisa digunakan jika tersedia angkatan kerja yang terdidik.

World Economic Forum (WEF) dalam Daryanto (2010) menggunakan 12 pilar utama yang mempengaruhi tingkat keyakinan investor dalam melakukan investasi yaitu, diantaranya: pilar kelembagaan (institutions), pilar infrastruktur (infrastructure), pilar stabilitas makroekonomi (macroeconomic stability), pilar kesehatan dan pendidikan dasar (health and primary education), pilar pendidikan tinggi dan pelatihan (higher education and training) dan pilar efisiensi tenaga kerja (labour market efficiency).

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa kebanyakan dari pilar utama yang mempengaruhi tingkat keyakinan investor dalam melakukan investasi merupakan pilar atau sektor yang dilaksanakan dan dikembangkan melalui kebijakan anggaran pemerintah terutama anggaran pembangunannya.

Cavallo dan Daude (2008:5) mengemukakan bahwa investasi publik memberikan efek *crowd in* terhadap investasi swasta (contoh karena pembangunan jalan atau bandara maka akan menyediakan akses bagi perusahaan-perusahaan untuk memasuki pasar), sehingga produktivitas dari modal publik harus ditingkatkan.

Pentingnya produktivitas dari investasi publik juga diungkapkan oleh Isham dan Kaufmann dalam (Cavallo dan Daude 2008: 26), menurut mereka investasi publik dalam beberapa bidang akan melengkapi investasi swasta, namun dalam bidang yang lain investasi tersebut mungkin akan menggantikan investasi swasta. Hal ini berarti bahwa bukan hanya kuantitas dari investasi yang menjadi permasalahannya melainkan adalah kualitas dari investasi tersebut.

Selanjutnya menurut Belloc dan Vertova (2004:2) bahwa investasi publik dan investasi swasta berhubungan secara komplementer jika investasi publik menyediakan kemudahan terhadap sektor swasta seperti halnya: *pertama*, tersedianya infrastruktur ekonomi dan sosial akan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi keputusan pihak swasta untuk berinvestasi. Hal ini dikarenakan melalui pelayanan jasa-jasa pokok yang telah tersedia seperti transportasi, komunikasi, pendidikan dll terhadap sistem produksi baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. *Kedua*, investasi publik akan membantu menekan biaya produksi (melalui ketersediaan jalan, tol, listrik, transportasi masa dll), sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi publik akan meningkatkan terhadap ekspektasi penjualan dan keuntungan yang akan mempengaruhi keputusan pihak swasta untuk lebih memperbesar investasinya.

Erden dan Holcombe (2005:576) mengemukakan bahwa investasi pemerintah memiliki hubungan komplementer dengan investasi swasta di dalam pembangunan ekonomi pada negara berkembang. Penelitian tersebut menggunakan data tahun 1980-1997 di 50 negara berkembang. Hasil empiris menunjukkan bahwa kenaikan investasi pemerintah sebesar 10 persen akan memberikan efek kenaikan investasi swasta sebesar 2 persen.

Selain itu Erden dan Holcombe (2005:576-577) juga menyatakan bahwa ada dua pendekatan dalam menganalisis pengaruh dari investasi publik dalam pertumbuhan ekonomi. *Pertama*, berdasarkan fungsi produksi neoklasik, dimana memasukkan investasi publik sebagai salah satu input dan pengukuran produktivitasnya didapat melalui fungsi produksi tersebut. *Kedua*, pendekatan

dengan menggunakan sebuah model yang memperlihatkan pengaruh langsung dari investasi publik terhadap investasi swasta dan juga pengaruh tak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengaruhnya terhadap investasi swasta.

Selanjutnya Hussain,dkk (2009:137) menyatakan bahwa investasi sektor publik sangat membantu bagi perkembangan investasi sektor swasta karena investasi publik menghasilkan modal dalam bentuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan dll. Proyek-proyek ini membutuhkan biaya yang besar dan memiliki keuntungan jangka panjang. Pihak swasta mengambil keuntungan dari investasi sektor publik ini. Infrastruktur yang lebih baik akan menekan biaya transpor dan juga fasilitas dalam lingkungan bisnis yang akan mempermudah akses ke dalam pasar. Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik juga meningkatkan kualitas human capital dalam perekonomian.

Dana pembangunan yang berasal dari pemerintah, selain merupakan salah satu sumber akumulasi modal dalam pertumbuhan ekonomi juga dapat memberikan pengaruh terhadap berkembangnya investasi swasta.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk keperluan investasi (pengeluaran pembangunan) amatlah sangat penting peranannya dalam upaya mendorong investasi swasta. Ketersediaan infrastruktur, sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal dasar untuk meningkatkan investasi yang bersumber dari pihak swasta.

5. Penelitian Sejenis

Untuk mendukung penelitian yang penulis lakukan, maka sangat diperlukan penelitian yang serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Agar dapat dilihat dan diketahui apakah penelitian ini sangat berpengaruh dan mendukung penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Tjahjanto Saptomo (2008) mengenai Pengaruh Pertumbuhan Investasi Publik, Pertumbuhan Investasi Swasta Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang mengemukakan bahwa investasi publik dan investasi swasta berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Jamzani Sodik (2007) mengenai Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel Di Indonesia mengemukakan bahwa investasi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia, sedangkan investasi swasta tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Khusaini (2006) mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Swasta Di Indonesia mengemukakan bahwa investasi publik memberikan pengaruh negatif terhadap investasi swasta di Indonesia.

Beda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan lokasi dan jangka waktu penelitian. Dimana penelitian ini meneliti mengenai investasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

B. Kerangka Konseptual

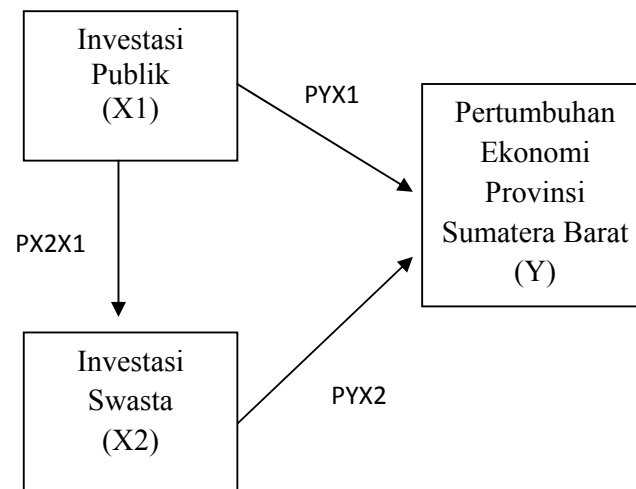
Kerangka konseptual atau kerangka berfikir adalah sebuah konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan, dan menunjukkan persepsi keakibatan antara variabel penyebab dengan variabel akibat yang akan diteliti berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah. Dalam usaha untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Barat, maka peranan investasi sangatlah dibutuhkan baik yang bersumber dari pemerintah (publik) dan yang bersumber dari pihak swasta.

Penelitian ini mencoba menganalisis dan mengetahui pengaruh investasi sektor publik yang tercermin melalui belanja pembangunan pemerintah daerah Sumatera Barat dan investasi swasta di Sumatera Barat. Adapun yang menjadi variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu investasi publik (X1) dan investasi swasta (X2) sebagai variabel bebas dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Y) sebagai variabel terikat.

Besarnya investasi yang bersumber dari pemerintah ini akan mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat. Penyediaan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM Sumbar melalui penyediaan fasilitas dan peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah diharapkan akan semakin mempengaruhi pihak swasta untuk menanamkan modalnya.

Selain dari sektor publik, penelitian ini juga mencoba melihat pengaruh dari pihak swasta yaitu berupa penanaman modalnya di Sumatera Barat. Besarnya aliran dana yang masuk ke Sumatera Barat akan mendorong dan

menstimulasi perkembangan dunia usaha daerah, sehingga nantinya akan meningkatkan produktivitas dan output dari Sumbar sendiri. Maka untuk lebih terarahnya penelitian ini dapat dilihat dari kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Pengaruh Investasi Publik Dan Investasi Swasta Terhadap Perekonomian Propinsi Sumatera Barat.

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka dapat dikemukakan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang hendak dibahas melalui penelitian ini. Adapun hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi publik terhadap investasi swasta Sumatera Barat.

$$H_0: P_{x2x1}=0$$

$$H_a : P_{x2x1} \neq 0$$

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi publik dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

$H_0: \rho_{yx1} = 0$

$H_a: \rho_{yx1} \neq 0$

$H_0: \rho_{yx2} = 0$

$H_a: \rho_{yx2} \neq 0$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil olahan data dengan analisis jalur dan pembahasan terhadap hasil penelitian, baik antar variabel penyebab terhadap variabel akibat maupun antara variabel penyebab melalui variabel penyebab lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Investasi publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investasi swasta, artinya investasi swasta yang terjadi di Sumatera Barat salah satunya ditentukan oleh besaran investasi publik yang dilakukan pemerintah. Semakin tinggi nilai investasi publik maka akan semakin tinggi pula nilai investasi swasta.
2. Secara bersama-sama investasi publik dan investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, artinya semakin tinggi investasi publik di Sumatera Barat maka akan semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Namun berbeda halnya dengan investasi swasta, di Sumatera Barat investasi swasta ini memberikan pengaruh yang signifikan namun negatif, sehingga semakin tinggi investasi swasta akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

3. Investasi publik dan investasi swasta sama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, namun dengan kontribusi yang berbeda.

B. Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel penyebab (investasi publik dan investasi swasta) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Investasi publik memiliki pengaruh yang positif, sedangkan investasi swasta memberikan pengaruh yang negatif. Oleh sebab itu penulis mengemukakan beberapa saran tentang penemuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat diharapkan terus membuat kebijakan anggaran yang sifatnya lebih mendorong pengeluaran investasi ketimbang yang bersifat konsumsi. Hal ini berguna untuk mempercepat proses pembangunan seperti jalan, jembatan, sarana transportasi, komunikasi, pelabuhan dan lain sebagainya, serta program untuk sektor pendidikan, kesehatan sehingga dapat meningkatkan produktivitas daerah.
2. Pemerintah Sumatera Barat diharapkan dapat lebih memperhatikan lagi mengenai pengelolaan investasi dari pihak swasta sehingga investasi swasta dapat memberikan pengaruh yang positif sebagaimana mestinya. Hal ini dapat tercermin dari peraturan-peraturan daerah dan berbagai kebijakan yang mendukung lainnya.

3. Pemerintah Sumatera Barat hendaknya dapat memperhatikan faktor kenyamanan fasilitas-fasilitas pendukung investasi seperti infrastruktur, sarana dan prasarana.
4. Aspek lain yang juga perlu diperhatikan yaitu kemudahan birokrasi agar prosedur investasi yang dilakukan tidak berbelit-belit sehingga tidak menyusahkan pihak investor yang akan masuk ke Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimayu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bappekti. Depkeu (Kompas edisi Mei).
- Akhirmen.2005. *Statistik 2*. Padang : Fakultas Ekonomi UNP.
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. (berbagai angka tahun). *Sumatera Barat Dalam Angka*. Padang.
- Belloc, Marianna dan Vertova. 2004. *How Does Public Investment Affect Economic Growth In HIPC?*. An Emperical Assessment. Gennaio.
- Cavallo, Eduardo dan Daude. 2008. *Public Investment In Developing Countries: A Blessing Or A Curse?*. Inter-American Development Bank, Working Paper#648.
- Erden, Lutfi and Randall G.H. 2005. *The Effect of Public Investment on Private Investment in Developing Economies*. Publik Finance Review, Vol.33 No.5 hal 575-602.
- Gujarati, Damoda. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Hussain, Adnan dkk. 2009. *Effectiveness Of Government Expenditure Crowding In Or Crowding Out: Empirical Evidence In Case Of Pakistan*. European journal of economics, finance and administrative science no. 16 hal 137-142.
- <http://www.eurojournals.com/finance.htm>
- Idris. 2004. *Analisis Data Model Kuantitatif dengan Program SPSS*. Padang: MM UNP.
- Ilyas, Marzuki. 1989. *Ilmu Keuangan Negara*. Direktorat Pendidikan Tinggi: Jakarta.